

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBULATAN KE BAWAH UANG KEMBALIAN OLEH KASIR TANPA KONFIRMASI PEMBELI DALAM TRANSAKSI DI SUPERMARKET DAN PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA *Juncto* UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

Boris Erick Sutrisna (1187018)

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, di mana antara manusia yang satu dengan lainnya hidup saling membutuhkan. Oleh karena itu, di antara hubungan antar manusia telah terjadi suatu interaksi. Interaksi manusia dalam hal bisnis secara konkrit dapat dilihat dalam aktivitas perdagangan, di mana dalam aktivitas perdagangan terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli yang didasarkan pada perjanjian. Salah satu pertemuan antara penjual dan pembeli dapat terjadi di suatu tempat yang disebut dengan supermarket sebagai pasar modern, yang menjual produk-produk dengan harga yang telah ditentukan dengan mencantumkan label harga pada barang yang dijual. Pembeli yang berminat membeli produk barang berkewajiban mengeluarkan sejumlah uang yang setara dengan harga barang. Pada praktiknya terjadi permasalahan hukum, di mana supermarket seringkali melakukan pembulatan ke bawah uang kembalian, tanpa adanya konfirmasi kepada pembeli yang menimbulkan kerugian. Terkait hal tersebut, maka perlu dikaji apakah pembulatan ke bawah uang kembalian tanpa konfirmasi pembeli dapat di kategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Di samping itu perlu dikaji bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pembeli.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dimana data yang didapat deskriptis analisi melalui data sekunder. Melalui metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pembulatan ke bawah uang kembalian di kasir supermarket tanpa konfirmasi pembeli, dikaitkan dengan unsur Perbuatan Melawan Hukum, serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh pembeli atas pembulatan ke bawah uang kembalian dan mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas pembulatan ke bawah uang kembalian.

Penulis menyimpulkan bahwa pembulatan uang kembalian ke bawah oleh kasir supermarket merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Karena perbuatan yang dilakukan oleh supermarket itu dilakukan secara melawan hukum, mengakibatkan kerugian bagi pembeli, dan perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pembeli akibat perbuatan tersebut dapat mengajukan upaya melalui jalur litigasi dan non litigasi. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya meliputi pengawasan secara formal terhadap perizinan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, belum dilakukan secara optimal. Penulis memberikan saran bagi pembeli bila mendapat perlakuan dari supermarket mengenai adanya pembulatan ke bawah uang kembalian dapat melihat harga barang untuk melakukan pengecekan nota belanja sehingga apabila ada kecurangan harga yang mengakibatkan kerugian bagi pembeli dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian. Bagi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan lebih memperhatikan, mengawasi, dan memberikan sanksi yang tegas bilamana adanya kerugian yang ditimbulkan akibat pembulatan ke bawah uang kembalian oleh supermarket.

Kata Kunci : Pembulatan ke bawah uang kembalian, perbuatan melawan hukum.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF ROUNDING OFF UNDER CHANGE BY CASHIER WITH NO ANY CONFIRMATION TO BUYER UNDER TRANSACTION IN SUPERMARKET AND SUPERVISION OF INDUSTRIAL AND COMMERCIAL DEPARTMENT BASED ON CIVIL CODE IN CONNECTION WITH LAW NUMBER 17 YEAR 2014 ABOUT TRADE

Boris Erick Sutrisna (1187018)

Basically, men are social creatures, in which they have need for each other to support their livings. Therefore, there is an interaction in relationship between human beings. Business interaction of men is concretely visible in commercial activities, in which vendor and buyer establish an encounter based on agreement. One encounter between vendor and buyer may be taken place in so-called supermarket, a modern market providing products at specified prices by attaching cost labels to commodities sold. A buyer interesting in the purchase of product has to send an amount of moneys equivalent to a commodity cost. In practice, the legal cases are emerging where supermarket make, frequently, a rounding off under change with not any confirmation to buyer leading to loss. Given the cases, it is necessary to investigate can the rounding off under change in supermarket cashier with not any confirmation to buyer is categorized into Illegal Act (Onrechtmatige daad). In addition, it is necessary to examine how type of supervision by Industrial and Commercial Department and efforts the buyer may to try.

Method being used in this study is normative juridical, by which the data got are put in descriptive analysis through secondary data. Using this method, it is intended to give view of rounding off under change in supermarket cashier with no any conformation to buyer related to substance of Illegal Act (Onrechtmatige daad), and investigating legal efforts the buyer may to take on over the rounding off under change and understanding how type of control by Industrial and Commercial Department over the rounding off under change.

The author concluded that rounding off under change by supermarket cashier is Illegal Act (Onrechtmatige daad). As act taken by the supermarket is illegal act, it is resulting in disadvantage for buyer, and the act contains fault. Legal efforts the buyer may to take on are filing indictments through litigation and non-litigation. Control by government via Industrial and Commercial Department is formal control over just licenses. However, the Industrial and Commercial Department is not yet carrying out optimally supervision. The author give buyers with suggestions when they have treatments by supermarket concerned with rounding off under change, they should observe costs of commodities to check their notes of expenses, thereby when any fraudulence of costs that result in loss the buyers can notify it to police. Government via Industrial and Commercial Department should be more watching, controlling over, and establishing firm sanctions to supermarkets when they commit the rounding off under change leading to losses,

Keywords: Rounding off under change, illegal act.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN	iv
LEMBAR TELAH MENGIKUTI SIDANG UJIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI DI SUPERMARKET DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA	
A. Pengertian Transaksi Pada Umumnya.	
1. Transaksi Dalam Perdagangan Barang dan Jasa	26
2. Subjek Hukum dalam Transaksi Barang dan Jasa	28

a.	Pengertian Subjek Hukum	29
b.	Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum	31
3.	Pasar Modern Sebagai Sarana Transaksi Jual Beli dan Perkembangannya	39
4.	Mata Uang Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dalam Transaksi Jual Beli	40
B.	Perjanjian Sebagai Dasar Perikatan Antara Penjual dan Pembeli	
1.	Pengertian Perjanjian	46
2.	Syarat Sah Perjanjian	49
3.	Asas-asas Perjanjian	54
4.	Sistem terbuka dan Asas Konsensualisme	58
5.	Jenis-Jenis Perjanjian	61
6.	Berakhirnya Perjanjian	64
C.	Wanprestasi Dalam Perjanjian	66
D.	Perbuatan Melawan Hukum	70
BAB III	PEMBULATAN UANG KEMBALIAN KE BAWAH DALAM PRAKTEK TRANSAKSI DI SUPERMARKET DAN PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEBAGAI PENGAWASAN KEGIATAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
A.	Supermaket Sebagai Bentuk Pasar Modern.....	74
B.	Bentuk Badan Usaha Dalam Pendirian Supermaket	76
1)	Pengertian Badan Usaha	76

2) Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum	77
3) Bentuk Badan Usaha Berbadan Hukum	79
A. Struktur Organisasi dan Alur Kebijakan Supermarket Pada Umumnya	84
B. Kebijakan Pembulatan Ke Bawah Uang Kembalian di Supermarket ..	89
C. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebagai Pengawas Kegiatan Perdagangan	93

BAB IV ANALISIS PEMBULATAN KE BAWAH UANG KEMBALIAN OLEH KASIR TANPA KONFIRMASI PEMBELI DALAM TRANSAKSI DI SUPERMARKET DAN PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA *Juncto* UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN.

A. Kualifikasi Pembulatan Ke Bawah Uang Kembalian Oleh Kasir Di Supermarket Tanpa Konfirmasi Pembeli Dalam Transaksi Di Supermarket.....	100
B. Upaya Yang Dapat Ditempuh Oleh Pembeli Atas Pembulatan Ke Bawah Uang Kembalian Oleh Kasir Tanpa Konfirmasi Dalam Transaksi Di Supermarket.....	112
C. Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Atas Pembulatan Ke Bawah Uang Kembalian Oleh Kasir Tanpa Konfirmasi Pembeli Dalam Transaksi Di Supermarket.....	120

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan 125

B. Saran 128

DAFTAR PUSTAKA129

CURRICULUM VITAE

